

KINERJA BUMN DAN PERTUMBUHAN EKONOMI: STRATEGI PENGEMBANGAN INDUSTRI PERTANIAN

KINERJA BUMN DAN PERTUMBUHAN EKONOMI: STRATEGI PENGEMBANGAN INDUSTRI PERTANIAN

Oleh:

Burhanudin Mukhamad Faturahman

Eka Budiyantri

Iwan Hermawan

Mandala Harefa

Rafika Sari

Editor: Prof. Dr. I Wayan Rusastra, APU

Yayasan Pustaka Obor Indonesia
Jakarta, 2020

Judul:
Kinerja BUMN dan Pertumbuhan Ekonomi:
Strategi Pengembangan Industri Pertanian

Oleh:
Burhanudin Mukhamad Faturahman; Eka Budiyantri;
Iwan Hermawan; Mandala Harefa; Rafika Sari

Editor: Prof. Dr. I Wayan Rusastra, APU

xx + 166 hlm; 15,5 x 23 cm
ISBN 978-623-321-056-0 (PDF)

Copyright ©2020
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
All Rights Reserved

Penerbitan ini dimungkinkan atas kerja sama
Yayasan Pustaka Obor Indonesia dengan
Pusat Penelitian Badan Keahlian
Dewan Perwakilan Rakyat
Republik Indonesia

Cetakan pertama: Desember 2020
YOI: 1952.38.210.2020
Desain sampul: Masugeng

Yayasan Pustaka Obor Indonesia
Jl. Plaju No. 10, Jakarta 10230, Indonesia
T. + 62 (0)21 31926978, 31920114
F. + 62 (0)21 31924488
E-mail: yayasan_obor@cbn.net.id
<http://www.obor.or.id>

KATA PENGANTAR

Buku dengan judul, *Kinerja BUMN dan Pertumbuhan Ekonomi: Industri Pertanian* memegang peranan strategis dan kontekstual dalam kondisi stagnasi dan bahkan kontraksi ekonomi sebagai dampak dari gejolak ekonomi global dan pandemi Covid-19 saat ini. Pemantapan pertumbuhan ekonomi akan ditentukan oleh optimalisasi relokasi anggaran dan stimulus ekonomi, peningkatan ekspor dan daya saing komoditas pertanian, dan pengembangan substitusi impor produk pangan halal Indonesia. Penguatan kedaulatan pangan wilayah perbatasan merupakan komplemen strategis dalam mencapai pembangunan dan pertumbuhan inklusif nasional. Pada semua aspek pembangunan ini, BUMN yang kuat dan berdaya saing akan mampu memainkan peran ganda sebagai entitas bisnis dan pelayanan publik.

Buku dengan tema utama pemantapan pertumbuhan ekonomi menuju pembangunan dan pertumbuhan berkualitas didukung dua bagian utama, yaitu (i) problematika aksi korporasi dan peningkatan pertumbuhan ekonomi dan (ii) pengembangan industri pertanian berbasis promosi ekspor dan penguatan kedaulatan pangan wilayah perbatasan. Buku didukung oleh lima karya tulis ilmiah dengan sekuensi dan konektivitas yang baik dan sejalan dengan sub-tema dan tema utama dari buku ini. Kelima makalah membahas peningkatan kinerja BUMN, kebijakan mengatasi stagnasi pertumbuhan ekonomi nasional, strategi peningkatan ekspor dan daya saing komoditas pertanian, penguatan kedaulatan pangan, dan pengembangan produk pangan halal Indonesia. Optimalisasi dan harmoni kelima aspek ini diharapkan mampu merealisasikan pembangunan pertumbuhan ekonomi berkualitas.

Dr. Indra Pahlevi, S.IP., M.Si.

Pada kesempatan yang baik ini, saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada peneliti yang telah menunjukkan dedikasinya dan memberikan kontribusi pemikiran yang inovatif sehingga dapat dirumuskan strategi dan kebijakan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi berkualitas pada tingkat wilayah dan agregat nasional. Kepada Prof. Dr. I Wayan Rusastra, APU dari Forum Komunikasi Profesor Riset (FKPR) Kementerian Pertanian disampaikan terima kasih atas upayanya membangun struktur dan perbaikan editorial, sehingga buku ini layak diterbitkan dan disimak pembaca. Kita semua berharap invensi dan inovasi kebijakan yang disarankan bermanfaat dalam mendukung pembangunan dan pertumbuhan inklusif melalui dukungan BUMN dalam pengembangan industri pertanian dan penguatan kedaulatan pangan.

Jakarta, 20 Oktober 2020
Kepala Pusat Penelitian-BK DPR-RI,

Dr. Indra Pahlevi, S.IP., M.Si.
NIP: 19711117 199803 1 004

PROLOG

KINERJA BUMN DAN PERTUMBUHAN EKONOMI: JUSTIFIKASI PROMOSI EKSPOR KOMODITAS PERTANIAN DAN PENGUATAN KEDAULATAN PANGAN

Prof. Dr. I Wayan Rusastra, APU

Buku dengan judul, *Kinerja BUMN dan Pertumbuhan Ekonomi: Industri Pertanian* terdiri atas dua bagian berikut aspek strategis pendukungnya. *Pertama*, problematika aksi korporasi dan peningkatan pertumbuhan ekonomi yang membahas peningkatan kinerja BUMN, dan kebijakan makroekonomi serta program pemulihan ekonomi nasional. *Kedua*, pengembangan industri pertanian melalui upaya promosi ekspor, pengembangan, penguatan kedaulatan pangan, dan pengembangan industri makanan dan minuman halal Indonesia.

Problematika Aksi Korporasi dan Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi

Pembangunan BUMN yang kuat, maju, mandiri, dan berdaya saing memegang peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi berkualitas. BUMN mencakup 114 perusahaan dengan nilai aset sekitar Rp8,0 ribu triliun (Desember, 2019) perlu dikelola secara optimal sebagai pelaku ekonomi untuk mendukung sistem perekonomian nasional berbasis kesejahteraan (*welfare state*).

Beberapa permasalahan yang dihadapi BUMN, di antaranya adalah (a) pertumbuhan cabang usaha yang diduga kuat berdampak terhadap inefisiensi usaha; (b) sinergi antar-BUMN yang berpotensi sebagai kartel dan mengesampingkan aspek transparansi; (c) mekanisme BUMN *holding* yang membutuhkan payung hukum dalam perspektif membangun integrasi hulu-hilir yang efektif dan efisien; dan (d) kinerja direksi yang dinilai belum optimal dalam pengambilan keputusan strategis pada momentum yang tepat sehingga berdampak terhadap keberlanjutan pengelolaan korporasi. Problematika aksi korporasi tersebut perlu diupayakan solusinya untuk peningkatan kinerja BUMN.

Pertumbuhan ekonomi nasional tidak dapat dilepaskan dari pasang-surut perkembangan investasi di tanah air. Dinamika pertumbuhan ekonomi dan investasi sangat diwarnai oleh dinamika faktor eksternal seperti gejala ekonomi global dan yang terakhir adalah pandemi Covid-19. Dalam pelaksanaan RPJM tahun 2015-2019 tantangan besar yang dihadapi di tingkat global di antaranya imbas krisis utang Yunani, Brexit, dan perang dagang Tiongkok-Amerika Serikat. Dalam lima tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi nasional stagnan pada kisaran 5,0 persen, jauh di bawah rancangan awal yang ditetapkan sebesar 7,0 persen per tahun. Pada dasarnya stagnasi perekonomian ini disebabkan oleh faktor utama rendahnya tingkat produktivitas seiring dengan tidak berjalannya transformasi struktural perekonomian nasional. Pada awal Maret 2020, Indonesia menghadapi tantangan global pandemi Covid-19, dan pandemi ini ditetapkan pemerintah sebagai bencana nasional. Menteri Keuangan memprediksi pertumbuhan ekonomi nasional mengalami penurunan menjadi 2,3 persen, dan bahkan dapat mengalami pertumbuhan negatif 0,4 persen, jika pandemi Covid-19 belum dapat dikendalikan sampai akhir tahun 2020.

Pengembangan Ekspor Komoditas Pertanian dan Penguatan Kedaulatan Pangan

Pembangunan industri pertanian memegang peranan penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan pemerataan hasil pembangunan. Dalam konteks ini strategi peningkatan ekspor dan daya saing komoditas pertanian, pengembangan industri makanan dan minuman, dan penguatan kedaulatan pangan memegang peranan strategis. Peningkatan ekspor dan pengembangan industri makanan dan minuman diharapkan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi melalui perolehan devisa, sementara industri makanan dan minuman halal UMKM dan pengembangan pertanian wilayah T-3 (terdepan, terluar, terpinggirkan) akan mendorong pemerataan hasil pembangunan.

Indonesia saat ini membutuhkan sumber-sumber pertumbuhan ekonomi, sehingga gerakan tiga kali lipat ekspor (Gratieks) dan peningkatan daya saing ekspor komoditas pertanian dinilai sangat strategis. Gratieks dalam lima tahun ke depan (tahun 2019-2024) dengan target kenaikan produksi komoditas utama pertanian 7,0 persen per tahun dan kontribusi ekspor 7,5 persen terhadap ekspor nonmigas (setara Rp1.800 triliun) menghadapi tantangan internal dan eksternal yang cukup berat. Tantangan tersebut mencakup pencapaian target swasembada pangan, pemenuhan bahan baku industri pangan dalam negeri, konversi dan degradasi sumber daya lahan, serta upaya peningkatan daya saing ekspor komoditas pertanian. Gratieks sebagai penghela pertumbuhan ekonomi nasional menjadi semakin penting mengingat pandemi Covid-19 akan memberi tekanan terhadap pertumbuhan pertanian nasional dan permintaan ekspor secara global.

Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dinyatakan bahwa persoalan pangan ditujukan untuk mencapai kedaulatan pangan, kemandirian pangan, dan ketahanan pangan secara simultan. Kedaulatan pangan diharapkan mampu mengatasi

permasalahan dasar tentang pangan, seperti gizi buruk, kelaparan, dan rawan pangan. Pembangunan pertanian di wilayah perbatasan diharapkan mampu mengatasi ketiga permasalahan pangan, yaitu kedaulatan, kemandirian, dan ketahanan pangan. Pembangunan wilayah perbatasan dihadapkan pada sejumlah permasalahan yang cukup kompleks di antaranya terkait perencanaan pembangunan, keterbatasan kondisi sosial ekonomi masyarakat, kelemahan dalam penegakan hukum, dan eksistensi kelembagaan terkait dengan sinkronisasi pengelolaan kawasan perbatasan. Dalam perspektif mengatasi permasalahan yang kompleks ini pemerintah menetapkan kebijakan pembangunan pangan melalui “Lumbung Pangan Berorientasi Ekspor di Wilayah Perbatasan” (LPBE-WP) di lima provinsi perbatasan Indonesia. Kebijakan ini pada dasarnya merupakan kegiatan pertanian terpadu berbasis wilayah dan pengembangan kawasan yang bersentuhan dengan berbagai aspek dan sektor pembangunan. Pengembangan LPBE-WP diharapkan dapat mengakomodasi keragaman jenis pangan sebagai prioritas, konsep pemenuhan kebutuhan pangan berbasis sumber daya lokal, mengurangi ketergantungan terhadap komoditas beras, dan dapat mengatasi kerentanan terhadap kerawanan pangan.

Pada tataran global pasar industri pangan halal mencapai USD2,2 triliun (tahun 2018) dan diperkirakan akan mencapai USD3,2 triliun pada tahun 2024. Indonesia memiliki potensi untuk menjadi sentra halal dunia, di mana pada tahun 2019 menempati peringkat ke-5 dunia, sementara tahun sebelumnya hanya menempati peringkat ke-10. Salah satu sektor produk halal yang berkembang pesat adalah industri makanan dan minuman halal. Konsumsi makanan dan minuman halal penduduk muslim dunia diprediksi akan meningkat dari 5,1 persen (tahun 2019) menjadi 6,3 persen (tahun 2024), yaitu mencapai USD1,97 triliun. Produsen dan eksportir makanan halal terbesar dunia adalah Brazilia dan Australia (negara nonmuslim), sementara Indonesia merupakan negara pengimpor pangan halal terbesar ke-4

dunia. Indonesia sebagai negara berpenduduk muslim terbesar dunia memiliki potensi yang sangat besar untuk mengembangkan produk makanan dan minuman halal dunia untuk substitusi impor maupun promosi ekspor dalam perspektif penghematan devisa dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

Tujuan dan Sasaran

Berdasarkan pada latar belakang tersebut maka tujuan dari penulisan buku ini adalah (a) menganalisis problematika aksi korporasi dan peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional melalui perumusan strategi peningkatan kinerja BUMN, serta perumusan kebijakan makroekonomi dan program pemulihan ekonomi nasional dan (b) menganalisis kinerja ekspor dan daya saing komoditas pertanian Indonesia, penguatan kedaulatan pangan wilayah perbatasan, dan pengembangan industri makanan dan minuman halal sebagai produk substitusi impor dan potensinya untuk memenuhi pasar produk halal dunia. Sasarannya adalah untuk menggalang dukungan berbagai pihak, khususnya BUMN bersama-sama dengan UMKM, dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan melalui pengembangan komoditas ekspor dan substitusi impor serta penguatan kedaulatan pangan, khususnya di wilayah perbatasan.

Jakarta, 20 Oktober 2020

Editor

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	v
Prolog	vii
Daftar Isi	xiii
 <i>Subtema Pertama</i>	
PROBLEMATIKA AKSI KORPORASI DAN PENINGKATAN PERTUMBUHAN EKONOMI	1
1 PROBLEMATIKA AKSI KORPORASI DAN STRATEGIS PENINGKATAN KINERJA BADAN USAHA MILIK NEGARA	
<i>Rafika Sari</i>	3
I. Pendahuluan	3
II. Kinerja Keuangan Badan Usaha Milik Negara	6
III. Problematika dan Strategi Peningkatan Kinerja BUMN	11
3.1. Pertumbuhan Cabang Usaha dan Strategi Peningkatan Efisiensi	11
3.2. Sinergi Antar-BUMN dan Transparansi Tatakelola Perusahaan	15
3.3. Mekanisme BUMN <i>Holding</i> Berbasis Regulasi	17
3.4. Kinerja Direksi dan Strategi Keberlanjutan Korporasi	19
IV. Penutup	21
Daftar Pustaka	23

2	DINAMIKA PERTUMBUHAN EKONOMI: KEBIJAKAN MAKROEKONOMI DAN PROGRAM PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL	
	<i>Mandala Harefa</i>	27
	I. Pendahuluan	27
	II. Dinamika dan Perspektif Pertumbuhan Ekonomi Nasional	31
	III. Konsepsi dan Perspektif ke Depan Investasi	35
	IV. Tantangan dan Perspektif Kebijakan Investasi	38
	V. Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Indikator Makroekonomi dan Perspektif Pertumbuhan Ekonomi	41
	5.1. Dampak terhadap Investasi	41
	5.2. Dampak terhadap Indikator Makroekonomi	44
	5.3. Program PEN dan Perspektif Kebijakan 2021	46
	5.4. Perspektif Kinerja Ekonomi Nasional 2021	49
	VI. Penutup	51
	Daftar Pustaka	53
	 <i>Subtema Kedua</i>	
	PENGEMBANGAN INDUSTRI PERTANIAN: PROMOSI EKSPOR DAN PENGUATAN KEDAULATAN PANGAN	55
3	STRATEGI GERAKAN TIGA KALI LIPAT EKSPOR (GRATIEKS) DAN DAYA SAING KOMODITAS PERTANIAN INDONESIA	
	<i>Iwan Hermawan</i>	57

I.	Pendahuluan	57
II.	Gratieks dan Kinerja Ekspor Komoditas Pertanian	61
	2.1. Konseptual Gratieks	62
	2.2. Kinerja Perdagangan Sektor Pertanian Indonesia	68
III.	Daya Saing dan Penetrasi Pasar Komoditas Sektor Pertanian	73
	3.1. Daya Saing Komoditas Sektor Pertanian	74
	3.2. Penetrasi Pasar Komoditas Sektor Pertanian	85
IV.	Gratieks dan Perekonomian Indonesia	87
	4.1. Dampak Gratieks terhadap Kinerja Perekonomian Indonesia	88
	4.2. Dampak Gratieks terhadap Perkembangan <i>Output</i> Sektoral Indonesia	90
V.	Penutup	92
	Daftar Pustaka	94

4 **PENGUATAN KEDAULATAN PANGAN WILAYAH PERBATASAN: MENUJU NILAI DEMOKRATIS HAK ATAS PANGAN**

	<i>Burhanudin Mukhamad Faturahman</i>	101
I.	Pendahuluan	101
II.	Problematika Perekonomian dan Pengelolaan Pangan di NTT	107
	2.1. Perekonomian Masyarakat Nusa Tenggara Timur	110

2.2.	Pengelolaan Pangan di Nusa Tenggara Timur	112
III.	Undang-Undang Pangan Pasca Reformasi	114
IV.	Pembangunan Pangan dan Kedaulatan Pangan di NTT	117
4.1.	Pangan NTT dalam RPJMD	117
4.2.	Upaya Memperkuat Kedaulatan Pangan di NTT	124
V.	Penutup	127
	Daftar Pustaka	129
5	PENGEMBANGAN POTENSI INDUSTRI MAKANAN DAN MINUMAN HALAL INDONESIA	
	<i>Eka Budiyaniti</i>	133
I.	Pendahuluan	133
II.	Definisi dan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal	135
III.	Potensi Industri Makanan dan Minuman Halal Indonesia	138
IV.	Pengembangan Potensi Industri Makanan dan Minuman Halal Indonesia	141
V.	Penutup	146
	Daftar Pustaka	148
	Epilog	151
	Indeks	157
	Tentang Penulis	161
	Tentang Editor	165

DAFTAR TABEL

PROBLEMATIKA AKSI KORPORASI DAN STRATEGIS PENINGKATAN KINERJA BADAN USAHA MILIK NEGARA

Tabel 1.	Kinerja Keuangan BUMN, Tahun 2008 dan 2018 (Rp Triliun)	7
Tabel 2.	Sepuluh BUMN Kontributor Dividen Terbesar, Tahun 2019	8
Tabel 3.	Tujuh BUMN Merugi, Tahun 2018	10
Tabel 4.	BUMN <i>Holding</i> di Indonesia, Tahun 1995-2019	18

DINAMIKA PERTUMBUHAN EKONOMI: KEBIJAKAN MAKROEKONOMI DAN PROGRAM PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL

Tabel 1.	Perkembangan Realisasi Penanaman Modal Tahun 2019 dan 2020 (Rp. Triliun)	44
----------	--	----

STRATEGI GERAKAN TIGA KALI LIPAT EKSPOR (GRATIEKS) DAN DAYA SAING KOMODITAS PERTANIAN INDONESIA

Tabel 1.	Konseptual Gratieks-Kementerian Pertanian Indonesia, 2020	63
Tabel 2.	Langkah-langkah Operasional Gratieks Kementerian Pertanian Indonesia, 2021-2024	65

Tabel 3.	Proyeksi Kenaikan Ekspor Sektor Pertanian Berdasarkan Gratieks. 2020-2024	67
Tabel 4.	Matriks Posisi dari Daya Saing Komoditas melalui Metode EPD	74
Tabel 5.	Posisi <i>Export Product Dynamic</i> untuk Komoditas Pertanian Indonesia di Pasar Amerika Serikat dan Uni Eropa, 2001-2019	86
Tabel 6.	Posisi <i>Export Product Dynamic</i> untuk Komoditas Pertanian Indonesia di Pasar Jepang dan Tiongkok, 2001-2019	87
Tabel 7.	Dampak Gratieks terhadap Kinerja Perekonomian di Indonesia (dalam persentase)	89
Tabel 8.	Dampak Gratieks terhadap <i>Output</i> Sektoral di Indonesia (dalam persentase)	91

PENGUATAN KEDAULATAN PANGAN WILAYAH PERBATASAN: MENUJU NILAI DEMOKRATIS HAK ATAS PANGAN

Tabel 1.	<i>Ranking</i> Indonesia pada Tingkat Kelaparan Dunia Tahun 1992, 2000, 2008 dan 2017	103
Tabel 2.	Komoditas Ekspor Eksisting dan Potensial dari Lima Provinsi Prioritas Pengembangan LPBE-WP	106
Tabel 3.	Indikator Misi RPJMD NTT Tahun 2009-2013	118
Tabel 4.	Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan Nusa Tenggara Timur dalam RPJMD Tahun 2013-2018	121

DAFTAR GAMBAR

STRATEGI GERAKAN TIGA KALI LIPAT EKSPOR (GRATIEKS) DAN DAYA SAING KOMODITAS PERTANIAN INDONESIA

Gambar 1.	Perkembangan Ekspor Komoditas Pertanian Indonesia ke Pasar Dunia, 2001-2019	68
Gambar 2.	Perkembangan Ekspor Komoditas Pertanian Indonesia ke Pasar Negara Tujuan, 2001-2019	70
Gambar 3.	Perkembangan Neraca Perdagangan Subsektor Pertanian Indonesia, 2001-2019	72
Gambar 4.	Perkembangan Daya Saing Komoditas per Subsektor Pertanian Indonesia di Pasar Dunia, 2001-2019	76
Gambar 5.	Perkembangan Daya Saing Komoditas Pertanian Indonesia di Pasar Dunia, 2001-2019	78
Gambar 6.	Perkembangan Daya Saing Komoditas Pertanian Indonesia di Pasar Amerika Serikat, 2001-2019	80
Gambar 7.	Perkembangan Daya Saing Komoditas Pertanian Indonesia di Pasar Uni Eropa, 2001-2019	81
Gambar 8.	Perkembangan Daya Saing Komoditas Pertanian Indonesia di Pasar Jepang, 2001-2019	83
Gambar 9.	Perkembangan Daya Saing Komoditas Pertanian Indonesia di Pasar Tiongkok, 2001-2019	85

PENGEMBANGAN POTENSI INDUSTRI MAKANAN DAN
MINUMAN HALAL INDONESIA

Gambar 1.	15 Besar Indikator Ekonomi Islam Global, Tahun 2019	134
Gambar 2.	Statistik Produk Halal LPPOM MUI Indonesia, Tahun 2015-2019	140

EPILOG

KINERJA BUMN DAN PERTUMBUHAN EKONOMI: PERSPEKTIF PROMOSI EKSPOR KOMODITAS PERTANIAN DAN PENGUATAN KEDAULATAN PANGAN

Prof. Dr. I Wayan Rusastra, APU

Buku ini mengusung tema utama pemantapan pertumbuhan ekonomi berkualitas melalui peningkatan kinerja BUMN dalam peningkatan ekspor komoditas pertanian dan penguatan kedaulatan pangan. Terdapat dua sasaran pokok yang hendak dicapai, yaitu: (a) Merumuskan strategi peningkatan kinerja BUMN dan perspektif kebijakan makroekonomi dan program pemulihan ekonomi nasional; dan (b) Menganalisis pengembangan industri pertanian terkait dengan peningkatan ekspor komoditas pertanian, penguatan kedaulatan pangan, dan pengembangan industri makanan dan minuman halal Indonesia.

Problematika Aksi Korporasi dan Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi

Dalam makalahnya berjudul, “Problematika Aksi Korporasi dan Strategi Peningkatan Kinerja Badan Usaha Milik Negara” Rafika Sari menyatakan bahwa BUMN hadir dengan fungsi ganda sebagai pelayanan publik dan fungsi komersial sebagai bentuk

campurtangan pemerintah dalam sistem perkonomian. Ke depan, di tengah problematika yang dihadapi, kinerja BUMN diharapkan mampu meningkatkan efisiensi, menampilkan transparansi tatakelola perusahaan, mekanisme kerja berbasis regulasi, dan mampu menjaga keberlanjutan korporasi. BUMN dengan potensi dan kapasitas serta pengalaman yang mumpuni diharapkan berkontribusi nyata dalam pengembangan ekonomi domestik dan ekspor. Dalam hal ini berperan dalam peningkatan ekspor dan daya saing komoditas pertanian, peningkatan ketahanan dan kedaulatan pangan di wilayah perbatasan, dan dalam pengembangan industri makanan dan minuman halal indonesia. Kontribusi nyata BUMN ini diharapkan memberikan kontribusi dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pengembangan ekonomi wilayah perbatasan dalam perspektif pembangunan dan pertumbuhan inklusif.

Mandala Harefa dalam makalahnya “Dinamika Pertumbuhan Ekonomi: Kebijakan Makroekonomi dan Program Pemulihan Ekonomi Nasional” menyatakan dalam lima tahun terakhir (tahun 2015-2019) terjadi stagnasi pertumbuhan ekonomi nasional (sekitar 5,0 persen per tahun), karena dampak faktor eksternal perekonomian dunia, di samping tidak optimalnya proses transformasi struktural perekonomian nasional. Selanjutnya sejak awal tahun 2020 perekonomian global dan Indonesia dihadapkan pada tantangan pandemi Covid-19 yang berdampak pertumbuhan ekonomi dan ketidakpastian pemulihannya. Penanggulangan Covid-19 dalam bentuk PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) berdampak luas terhadap kesempatan berusaha dan kesempatan kerja, sehingga memberikan pukulan terhadap stagnasi pertumbuhan ekonomi nasional. Kebijakan responsif yang dilakukan pemerintah adalah memberikan stimulus ekonomi dan jaring pengaman sosial untuk mencegah lebih jauh kemerosotan kegiatan usaha, kesempatan kerja, dan daya beli masyarakat. Bank Indonesia melanjutkan pelonggaran likuiditas untuk membantu pemulihan ekonomi sektor UMKM

dan dunia usaha. Kebijakan realokasi anggaran untuk kesehatan, perlindungan sosial, dan pemulihan ekonomi nasional diharapkan secara bertahap dapat memperbaiki pondasi ekonomi tahun 2021-2024. Pada tahun 2021, pemerintah dan jajarannya (termasuk BUMN) diharapkan memfokuskan pembangunan industri pertanian dan ketahanan pangan, tanpa mengabaikan sektor lainnya dalam perspektif menjadi sumber pertumbuhan perekonomian nasional di era *new normal*.

Pengembangan Ekspor Komoditas Pertanian dan Penguatan Kedaulatan Pangan

Dalam makalahnya, “Strategi Gratieks (Gerakan Tiga Kaki Lipat Ekspor) dan Daya Saing Komoditas Pertanian Indonesia”, Iwan Hermawan mengemukakan bahwa dalam 20 tahun terakhir perkembangan ekspor komoditas sektor pertanian bersifat positif. Perkembangan positif ini tidak sejalan dengan perkembangan daya saingnya, terutama di pasar ekspor tradisional. Pasar Tiongkok merupakan salah satu pasar potensial ekspor sektor pertanian Indonesia. Gratieks menempatkan sektor pertanian secara agregat berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi sebesar 11,55 persen. Dalam perspektif peningkatan daya saing dibutuhkan peningkatan produktivitas dengan tetap memerhatikan standar produk yang dipersyaratkan oleh negara mitra dagang. Diversifikasi pasar tujuan ekspor masih sangat terbuka untuk dijangkau melalui acara dagang, kegiatan promosi, dan penguatan peran atase perdagangan.

Burhanudin Mukhamad Faturahman dalam makalahnya, “Penguatan Kedaulatan Pangan Wilayah Perbatasan: Menuju Nilai Demokratis Hak Atas Pangan” mengemukakan bahwa nilai demokratis hak atas pangan direfleksikan oleh sistem pangan lokal berdasarkan prinsip kedaulatan pangan yang megedepankan prinsip lokalitas pengembangan pangan oleh pemerintah daerah dan masyarakat setempat. Fakta empiris lapangan menunjukkan ketersediaan

pangan wilayah perbatasan terfokus pada pangan nasional dengan mengabaikan keberagaman pangan dan hak pangan lokal yang umum dikonsumsi masyarakat lokal. Tatakelola pembangunan pertanian lebih fokus pada upaya peningkatan produktivitas dan belum mengedepankan perbaikan pendapatan rumah tangga petani. Dinyatakan bahwa kebijakan pangan di era demokrasi membutuhkan forum publik secara terbuka dalam pengambilan keputusan hak atas pangan lokal oleh masyarakat. Dalam implementasinya UU Pangan agar diselaraskan dengan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal dalam pengembangan kedaulatan pangan, khususnya di wilayah perbatasan.

Dalam makalahnya, “Pengembangan Potensi Industri Makanan dan Minuman Halal Indonesia”, Eka Budiyaniti menyampaikan informasi bahwa Indonesia memiliki peluang yang sangat besar menguasai industri makanan dan minuman halal dunia. Potensi yang sangat besar ini membutuhkan optimalisasi dalam pengembangannya. Arah pengembangannya khususnya diarahkan untuk penghematan devisa melalui peningkatan produk makanan dan minuman substitusi impor, mengingat Indonesia adalah importir makanan minuman halal ke-4 terbesar dunia. Dalam jangka panjang dapat dikembangkan dengan orientasi pasar ekspor, mengingat potensi pengembangan produksi dan kelembagaan dalam negeri yang mendukung dalam pengembangannya. Dalam konteks ini dibutuhkan sinergi antara pemerintah, perbankan, LPPOM-MUI, dan pengusaha dalam mendukung pengembangan potensi industri makanan dan minuman halal di tanah air.

Saran Tindak Lanjut

Dalam perspektif mengatasi stagnasi dan pemantapan pertumbuhan ekonomi berkualitas melalui strategi penghematan devisa dan promosi ekspor, serta penguatan kedaulatan pangan, beberapa pemikiran ke depan yang perlu dipertimbangkan adalah:

- (1) Optimalisasi upaya peningkatan kinerja BUMN melalui peningkatan efisiensi, transparansi tatakelola perusahaan, restrukturisasi perusahaan melalui pembentukan *holding company*, dan pemantapan kinerja manajemen menuju keberlanjutan korporasi;
- (2) Optimalisasi target dan efektivitas stimulus ekonomi dan jaring pengaman sosial dengan sasaran keberlanjutan berusaha dan kesempatan kerja serta mempertahankan daya beli masyarakat;
- (3) Gratieks terbukti secara empirik berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi, namun dalam implementasinya masih membutuhkan kebijakan yang lebih detail dan aplikatif, di samping koordinasi dan kolaborasi lintas-sektor dalam peningkatan daya saing dan perluasan pasar;
- (4) Reorientasi pembangunan pangan wilayah perbatasan menuju prinsip dasar kedaulatan pangan yang mengedepankan pangan untuk rakyat, kontrol pangan secara lokal, pengembangan pengetahuan dan kearifan lokal, dan fasilitasi forum terbuka dalam perumusan kebijakan secara demokratis; dan
- (5) Optimalisasi dan harmonisasi upaya pengembangan industri makanan dan minuman halal Indonesia dengan mempertimbangkan sedikitnya lima aspek strategis, yaitu mempermudah mendapatkan sertifikat halal, integrasi dengan produsen melalui pengembangan rantai nilai produk pangan halal, memperkuat peran perbankan syariah, digitalisasi industri untuk peningkatan daya saing, dan pengembangan industri makanan dan minuman halal berorientasi ekspor.

Penutup

Peningkatan kinerja BUMN tidak bisa dilepaskan keterkaitannya dengan pertumbuhan ekonomi, pengembangan industri makanan dan minuman untuk substitusi impor dan promosi ekspor, penguatan ketahanan dan kedaulatan pangan. BUMN memiliki fungsi ganda sebagai entitas bisnis dan pelayanan sehingga berperan strategis

dalam pembangunan dan pertumbuhan inklusif. Peningkatan pertumbuhan ekonomi tidak terlepas dari upaya pemantapan proses transformasi struktural perekonomian, optimalisasi stimulus ekonomi, pengembangan ekspor dan daya saing komoditas pertanian, dan pengelolaan industri makanan dan minuman halal di dalam negeri.

Penguatan kedaulatan pangan wilayah sebagai instrumen strategis pemerataan pembangunan dalam implementasinya membutuhkan reorientasi pembangunan pertanian berbasis komunitas sehingga lebih relevan dan kontekstual dengan kebutuhan daerah dan masyarakat lokal. Jadi optimalisasi pengembangan industri pertanian (promosi ekspor, substitusi impor, dan penguatan kedaulatan pangan) didukung oleh BUMN yang kuat dan berdaya saing diharapkan mampu mencapai pembangunan dan pertumbuhan ekonomi berkualitas.

Jakarta, 20 Oktober 2020

Editor

INDEKS

A

aksi, 1, 5, 11, 20, 125, 151
anak perusahaan, 11, 13, 16
anggaran, 46, 47, 52, 116, 152
APBN, 40, 46, 50

B

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), 41, 44
Badan usaha Milik Negara (BUMN), 3, 5, 8, 10, 11, 14, 16, 18, 21, 47, 151, 154
Bank Dunia, 45
bantuan sosial (bansos), 47, 51
biaya, 47, 110, 123
bisnis, 6, 11, 12, 14, 19, 50, 104, 155

C

Community Action Plan (CAP), 124
Covid-19, 29, 30, 32, 33, 39, 41, 44, 45, 47, 49, 50, 61, 152
cucu Perusahaan, 4, 11, 13, 21

D

daya saing, 13, 40, 48, 57, 61, 70, 73, 74, 76, 79, 83, 87, 92, 115, 141, 144

demokrasi, 126, 154

direksi, 5, 11, 19

domestik, 4, 30, 32, 37, 45, 50, 77, 108, 152

dunia, 17, 21, 28, 29, 35, 38, 45, 47, 64, 68, 76, 79, 84, 133, 135

E

ekonomi, 11, 27, 28, 30, 31, 32, 35, 37, 38, 40, 45, 48, 49, 51, 61, 87, 105, 111, 137, 144
ekspor, 34, 57, 58, 61, 66, 68, 69, 71, 74, 76, 84, 86, 89, 92, 93, 104, 125, 141

F

Food and Agriculture Organization (FAO), 102, 103

G

geopolitik, 105
global, 29, 31, 33, 35, 60, 138
Global Trade Analysis Project (GTAP), 87
globalisasi, 101
Gratieks, 57, 59, 61, 62, 66, 74, 87, 88, 92

Indeks

H

halal, 133, 135, 136, 137, 139, 141
holding, 4, 18, 19

I

IFAD, 102
International Monetary Fund (IMF),
 29, 30, 33, 45
impor, 34, 60, 67, 76, 89, 104, 117,
 146
indeks, 45, 67
indikator, 31, 44, 45, 88, 118
industri, 5, 13, 27, 33, 47, 60, 68, 89,
 91, 133
inflasi, 32, 40, 45, 88, 90
infrastruktur, 29, 45, 48, 50, 75, 77,
 105, 107, 111, 138
insentif, 27, 47, 48, 89
instansi, 51
investasi, 5, 27, 31, 36, 38, 39, 41, 44,
 46, 49, 88, 161
investor, 27, 30, 39, 40

J

jaminan, 47, 70, 135
Joko Widodo, 4, 6, 13

K

kebijakan, 4, 11, 15, 18, 27, 30, 33,
 38, 40, 46, 51, 68, 77, 82, 93, 102,
 106, 114, 120, 125
kedaulatan, 55, 101, 102, 107, 114,
 115, 117
kementerian, 15, 17

kinerja, 6, 8, 11, 13, 14, 19, 21, 32, 39,
 43, 46, 49, 61, 68, 88, 93, 151, 154
komoditas, 35, 57, 59, 61, 64, 68, 69,
 71, 73, 77, 79, 80, 84, 86, 87, 92,
 93, 114, 122
konsumen, 84, 115, 134, 142
konsumsi, 32, 34, 45, 49, 109, 111,
 114, 134, 143
korporasi, 1, 4, 5, 11, 19, 49, 151
krisis, 28, 30, 33, 39, 48, 51, 69, 85
kurs, 45, 67, 76

L

Lambung Pangan Berorientasi Ek-
spor di Wilayah Perbatasan (LP-
BE-WP), 105

M

Majelis Ulama Indonesia (MUI), 135,
 137
makanan, 134, 135, 138
makroekonomi, 27, 41, 44, 151
minuman, 134, 135, 137, 138, 139
Model GTAP, 87
muslim, 133, 135, 139

N

Nawacita, 105
Nusa Tenggara Timur, 106, 108, 110,
 112, 117, 120, 123, 124

O

ototoritas, 101

P

pandemi, 30, 31, 33, 38, 40, 41, 44, 46, 50, 60, 90, 152
 pasar, 11, 16, 35, 37, 59, 62, 69, 76, 81, 84, 85, 92, 111, 114, 124, 127
 Produk Domestik Bruto (PDB), 33, 37, 49, 88, 139
 pemerintah, 8, 12, 15, 19, 20, 21, 27, 34, 36, 45, 50, 64, 84, 111, 116, 127, 136
 pemulihan, 18, 27, 31, 47, 49, 50
 perdagangan, 12, 28, 33, 35, 46, 61, 70, 72, 73, 87, 104
 perekonomian, 21, 29, 31, 33, 34, 35, 38, 46, 49, 52, 87, 88, 107, 110, 141
 perencanaan, 31, 51, 115, 116, 120, 124
 pertanian, 35, 55, 57, 58, 59, 61, 68, 69, 73, 74, 77, 79, 85, 86, 90, 92, 93, 105, 112, 117, 123, 125
 pertumbuhan, 4, 7, 10, 27, 28, 31, 35, 38, 39, 40, 44, 49, 57, 59, 61, 73, 86, 137
 perusahaan, 4, 5, 11, 13, 15, 17, 21, 38, 52, 126, 141
 penanaman modal asing (PMA), 41, 42, 43
 penanaman modal dalam negeri (PMDN), 42, 43
 potensi, 20, 38, 44, 50, 107, 110, 123
 periode, 27, 37, 51, 69, 85
 prioritas, 8, 15, 27, 29, 34, 41, 83, 106, 109
 produk, 12, 37, 67, 71, 77, 87, 133
 produktif, 40
 produsen, 115, 117, 135, 142, 147
 proses, 18, 37, 49, 84, 116, 126, 137
 prospek, 10, 29, 32

R

Republik Demokratik Timor Leste (RDTL), 107, 111
 realisasi, 7, 27, 42, 43, 44
 reformasi, 48, 50, 52, 114, 115
 regulasi, 4, 15, 20, 40, 49, 107
 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), 117, 120
 Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN), 28, 31
S
 sarana, 48, 108
 sumber daya manusia (SDM), 75, 108, 139
 sektor, 4, 11, 16, 33, 42, 45
 sektoral, 34, 66, 87, 93, 143
 sertifikasi, 82, 142, 144
 sistem, 15, 18, 70, 81, 105, 126
 stagnasi, 28, 38, 152
 strategi, 11, 19, 57, 65, 137
 strategis, 5, 9, 18, 20, 155
stunting, 108, 109
 swasta, 16, 31, 47
 syariah, 133, 137, 142, 144

T

target, 8, 19, 31, 36, 42, 44, 45, 60
 teknologi, 62, 67, 75, 117
top-down, 115
 tradisional, 92, 111, 153

U

usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), 47, 49, 142, 152
 Undang-Undang, 15, 16, 127
 usaha, 12, 15, 18, 51, 110

W

wabah, 29, 32, 33

WFP, 102

WHO, 102

TENTANG PENULIS

Burhanudin Mukhamad Faturahman, lahir di Ponorogo, tanggal 14 November 1992 adalah lulusan Sarjana Administrasi Publik Universitas Brawijaya tahun 2015 dan Magister Administrasi Publik Universitas Brawijaya pada tahun 2017. Penulis telah menerbitkan beberapa artikel ilmiah di antaranya Aktualisasi Nilai Demokrasi dalam Perekrutan dan Penjaringan Perangkat Desa, Kepemimpinan dalam Budaya Organisasi, *Innovation of Local Government in Improving Food Security in Pacitan Regency* dan Pemetaan Potensi Wilayah untuk Menunjang Kebijakan Pangan Kabupaten Pacitan. Penulis dapat dihubungi melalui email: burhanudin@dpr.go.id.

Eka Budiyaniti, lahir di Jakarta, 22 Januari 1984. Menempuh studi S1 pada jurusan Matematika – Fakultas MIPA, Universitas Padjadjaran pada tahun 2001 dengan kekhususan matematika terapan. Kemudian melanjutkan pendidikan Pascasarjana pada Jurusan Ilmu Ekonomi – Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia pada tahun 2006 dengan kekhususan kebijakan moneter dan perbankan. Bekerja di Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI mulai tahun 2009 sebagai Peneliti Bidang Ekonomi dan Kebijakan Publik dengan kepakaran Ekonomi Kebijakan. Beberapa topik jurnal dan buku yang telah ditulis antara lain adalah *time inconsistency* dalam kebijakan moneter, *inflation targeting*, subsidi pajak, pinjaman luar negeri, stabilitas sistem keuangan, krisis Eropa, sektor keuangan, *green banking*, *twin deficit*, bank khusus industri, industri manufaktur, investasi, *e-commerce*, industri 4.0, perdagangan beras, skema pembiayaan infrastruktur, dan

industri keuangan syariah. Penulis dapat dihubungi melalui email: eka.budiyanti@dpr.go.id.

Iwan Hermawan, menyelesaikan pendidikan doktoral Ilmu Ekonomi di Universitas Indonesia pada tahun 2020. Saat ini bekerja sebagai peneliti di Pusat Penelitian, Badan Keahlian-Setjen DPR RI dengan fokus pada isu-isu ekonomi makro, ekonomi internasional, dan ekonomi pertanian. Beberapa karya tulis ilmiah yang telah dipublikasikan melalui jurnal terakreditasi, prosiding, dan buku, antara lain yaitu “Measuring ASEAN Rice Non-Tariff Measures (NTMs) and Its Impact on Indonesian Food (Rice) Security” (ICAME, 2018), “Indonesian Readiness for Digital Economy: Case on Trade Flows in ASEAN Region” (ICOT 2019), “The Impact of ASEAN Economy Community on Indonesian Food Security: Rice Case” (bagian buku dari *Challenges of the Global Economy: Some Indonesian Issues*, 2019), dan “Integrasi Harga Beras Era Perdagangan Terbuka dan Dampaknya terhadap Swasembada dan Kesejahteraan Pelaku Ekonomi Beras” (Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan, 2020). Penulis dapat dihubungi melalui email: iwan.hermawan@dpr.go.id.

Mandala Harefa, adalah peneliti Kebijakan Publik pada Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, yang merupakan alumnus Program Pascasarjana, Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik-Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia. Penulis pada saat ini menjabat sebagai Peneliti Utama kepakaran Kebijakan Ekonomi Publik bidang desentralisasi dan ekonomi regional yang bertugas memberi dukungan kegiatan DPR dalam membuat kajian, analisis kebijakan, proses RUU menjadi undang-undang dan mempersiapkan makalah bagi Pimpinan, alat kelengkapan dewan dan para anggota DPR RI. Pada tahun 2018 mengikuti *World Bank Conference*, konferensi internasional dan melakukan berbagai penelitian lapangan yang telah diterbitkan di jurnal ilmiah dan dalam bentuk buku. Topiknya

berkaitan dengan permasalahan terkait kebijakan publik sesuai dengan fungsi kedewanan antara lain kebijakan Keuangan Negara dan Daerah, ekonomi Regional dan topik lainnya terkait dengan ekonomi publik BUMN dan UMKM termasuk pariwisata yang telah diterbitkan oleh Pusat Penelitian Badan Keahlian Dewan (BKD) DPR dan Balai Pustaka serta penerbit lainnya. Penulis dapat dihubungi melalui email: manhar@dpr.go.id

Rafika Sari, menyelesaikan studi S1 pada Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan (IESP), Fakultas Ekonomi, Universitas Diponegoro (1999) dan pendidikan Program Pasca Sarjana Ilmu Ekonomi Universitas Indonesia (2006). Bekerja sebagai Peneliti Bidang Ekonomi dan Kebijakan Publik pada Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI mulai tahun 2009 dengan kepakaran Kebijakan Publik. Tulisan yang sudah dipublikasikan antara lain terkait Badan Usaha Milik Negara termasuk di dalamnya Industri Strategis, Penyertaan Modal Negara, *Corporate Social Responsibility*, Sinergi BUMN, dan Privatisasi; Badan Usaha Milik Daerah; Desentralisasi Fiskal Daerah Tertinggal; Korporasi; Kawasan Industri; dan Kartel. Penulis dapat dihubungi melalui email: rafika.sari@dpr.go.id.

TENTANG EDITOR

I Wayan Rusastra, lahir di Denpasar, 31 Desember 1951. Ia menyelesaikan pendidikan *Ph.D Agricultural Economics* dari Universitas Filipina di Los Banos (UPLB) tahun 1995. Dalam perkembangan karirnya selama 37 tahun (1979-2016) sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian (PSEKP), ia ditetapkan sebagai Ahli Peneliti Utama (APU) pada tahun 2001 (Keppres RI No.68/M/2002). Pada 30 Desember 2010 ia dikukuhkan sebagai Profesor Riset Agroekonomi dan Kebijakan Pertanian dengan orasi: Reorientasi Paradigma Pengentasan Kemiskinan dalam Mengatasi Dampak Krisis Ekonomi Global. Orasi purna bakti dilakukan Desember 2016 dengan judul, SDG dan Nawacita: Implikasinya terhadap Penelitian dan Pembangunan Pertanian Berkelanjutan. Dalam perjalanan karirnya ia menerbitkan tidak kurang dari 150 karya tulis ilmiah (KTI), sebagai editor 36 buku/prosiding, Ketua Dewan Redaksi 3 jurnal ilmiah, yaitu Forum Agro Ekonomi (FAE), Jurnal Penelitian dan Pengkajian Teknologi Pertanian (JPPTP), dan Jurnal Analisis Kebijakan Pertanian (JAKP), serta sebagai Anggota Dewan Redaksi dan Mitra Bestari 10 jurnal ilmiah lainnya. Suatu kehormatan baginya sebagai Editor tunggal 12 buku unggulan di Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, dan Editor 13 buku/prosiding unggulan di PSEKP dengan lembaga mitra (nasional dan internasional) seperti IAARD Press/Balitbangtan, Puslitbangnak, DPP Perhepi, ACIAR, UNESCAP-CAPSA, APEC, dan FAO. Penugasan yang sempat diemban di antaranya adalah sebagai Kepala Bidang Publikasi dan Kerja sama Penelitian PSEKP, Deputy Direktur R&D UNESCAP-CAPSA, Tim Penilai Peneliti Pusat (TP3)-LIPI, Widyaiswara Luar Biasa

Pusbindiklat-LIPI, Tim Penilai naskah orasi Profesor Riset di PSEKP dan LIPI, Sekretaris Pokja Ahli Dewan Ketahanan Pangan Nasional, serta pembimbing dan promotor program doktor di IPB, UNPAD, dan UGM. Atas pengabdianannya dalam penelitian dan pengembangan iptek bidang agroekonomi dan kebijakan pembangunan, ia dianugerahi penghargaan: Ahli Peneliti Utama (APU) Berprestasi dari Menteri Pertanian (2002), Satyalancana Karya Satya X Tahun (1998), Satyalancana Karya Satya XX Tahun (2004), dan Satyalancana Karya Satya XXX Tahun (2015) dari Presiden Republik Indonesia. Ia dapat dihubungi melalui email: wrusastra@yahoo.com.